



# Buletin Parlementaria

## UU ASN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR



Nomor 1266/I/X/2023 • Oktober 2023



9 772614 339005

4 Revisi UU IKN  
Disahkan,  
Puan: Langkah  
Strategis  
Indonesia ke  
Arah Kemajuan

6 Antar Lembaga  
Diminta Lakukan  
Kerja Sama &  
Koordinasi Mitigasi  
Fenomena El Nino



# UU ASN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR

**D**PR RI resmi mengesahkan RUU tentang penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Sebelumnya, berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi II DPR RI, delapan fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna, sedangkan satu fraksi menyetujui dengan catatan.

Mendengar hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Paripurna kemudian menanyakan kembali kepada seluruh fraksi yang hadir di Paripurna untuk meminta persetujuan terkait pengesahan pengganti UU ASN tersebut. "Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dapat disahkan?" tanya Dasco yang kemudian dijawab 'setuju' oleh seluruh fraksi yang hadir di Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung mengatakan pembahasan UU ASN yang baru ini butuh waktu yang sangat panjang, kurang lebih dua tahun sembilan bulan. Sehingga diharapkan UU ASN ini bisa menjawab tantangan ASN ke depan agar terciptanya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan laporan terkait UU ASN saat Rapat Paripurna DPR RI.

pemerintahan yang semakin baik. "Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi II DPR RI Hugua bilang UU ASN ini merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi. Salah satunya kepastian posisi tenaga honorer, dimana tidak akan ada PHK massal untuk para pegawai tersebut. Selain itu, para tenaga honorer direncanakan untuk dapat melamar jalur khusus pada seleksi PPPK di rekrutmen ASN tahun ini.

Penyesuaian ini muncul setelah sebelumnya penerimaan PPPK bagi

honorer digabung dengan pelamar umum. Hugua melihat, sistem perankingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah berumur. Padahal tak sedikit dari mereka yang menghabiskan karirnya mengabdikan sebagai honorer di sudut daerah terpencil administrasi dan birokrasi negara Indonesia. "Karena kita harus memahami dan menghargai bahwa negara ini maju seperti sekarang tidak terlepas dari peran birokrasi otomatis, tapi sekali lagi jangan lupa bahwa peran tenaga honorer di dalam menjalankan mesin birokrasi itu tinggi, tinggi sekali," ujar Hugua.

**we,aha/aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya





# DPR Setujui Perpanjang Pembahasan 7 RUU

**D**PR RI melalui Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan memperpanjang waktu pembahasan 7 Rancangan Undang-Undang. Ketujuh RUU tersebut adalah RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika, RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

"Rapat Paripurna ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tujuh rancangan undang-undang tersebut diatas sampai dengan masa persidangan yang akan datang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diikuti persetujuan seluruh peserta sidang, dalam Rapat Paripurna ke-7 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Diketahui, perpanjangan waktu pembahasan ketujuh RUU tersebut berdasarkan laporan dari Pimpinan Komisi AKD DPR RI kepada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus sebelumnya yang meminta perpanjangan RUU sampai dengan masa persidangan yang akan datang. Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. **tn/aha**

WAKIL KETUA DPR RI  
SUFMI DASCO AHMAD.

FOTO: FOTO:RSB/AGUNG



Scan QR  
untuk berita  
selengkapny



## PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiska Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysle, Ballegg Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budliati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Ria Damayanti

## ADMINISTRASI

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Revisi UU IKN Disahkan, Puan: Langkah Strategis Indonesia ke Arah Kemajuan



FOTO: KRESNO/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani.

**K**etua DPR RI Puan Maharani menilai disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), akan menjadi langkah strategis yang akan membawa Indonesia ke arah kemajuan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan, dengan dukungan dari berbagai pihak, rakyat dapat menyambut pembangunan IKN dengan antusiasme.

"IKN adalah investasi masa depan yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia," kata Puan dalam keterangan yang

”

**IKN ADALAH INVESTASI MASA DEPAN YANG AKAN MEMBERIKAN MANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT INDONESIA.**

diterima **Parlementaria**, Rabu (4/10). Hal ini, tambahnya, merupakan kesempatan besar untuk memajukan negara ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah.

Puan melanjutkan, pembangunan IKN akan membawa manfaat langsung dengan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia. Ia menilai, hal ini merupakan upaya konkret untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran.

"IKN tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga contoh nyata pengembangan kota yang berkelanjutan. Penerapan teknologi terkini dalam perencanaan kota akan memberikan inspirasi bagi perkembangan kota-kota di seluruh dunia," pungkas Puan.  **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# DPR Setujui Arsul Sani Jadi Calon Hakim MK Terpilih



Arsul Sani saat foto bersama dengan para Pimpinan DPR RI setelah terpilih sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.

**D**alam rapat paripurna penutupan masa sidang I tahun sidang 2023-2024, Komisi III DPR menyampaikan laporan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2024.

Adapun hasil uji kelayakan terhadap Calon Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi terpilih menggantikan Wahiduddin Adams yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 17 Januari 2024. Hal itu, disampaikan Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Dijelaskan Adies, dalam pelaksanaan persiapan Uji Kelayakan

terhadap Calon Hakim Konstitusi dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang, telah diumumkan delapan nama Calon Hakim Konstitusi yang memenuhi persyaratan seleksi administrasi pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.

Ditegaskan Adies, dalam pemilihan Calon Hakim Konstitusi Komisi III DPR RI mengutamakan kualitas calon Hakim Konstitusi yang meliputi integritas, visi dan misi, serta kompetensi. Atas dasar kriteria itu komisi memilih dan menetapkan calon Hakim Konstitusi.

Diharapkan calon Hakim Konstitusi terpilih dapat menjadi Hakim Konstitusi yang mampu meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus pengawal Konstitusi.

"Demikian laporan hasil uji kelayakan (*fit and proper test*) calon Hakim Konstitusi, guna ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari ini, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi dari unsur Lembaga DPR RI," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco kemudian bertanya kepada anggota rapat paripurna, yang terdiri dari anggota DPR, apakah nama tersebut dapat disetujui. Anggota DPR menyetujui Arsul Sani jadi calon hakim MK terpilih. "Kepada Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan calon hakim konstitusi tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Dasco. disambut Setuju oleh anggota rapat. **rnm/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Antar Lembaga Diminta Lakukan Kerja Sama & Koordinasi Mitigasi Fenomena El Nino

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco

Ahmad dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 turut menyoroti fenomena El Nino yang tengah terjadi dan diperkirakan akan terjadi hingga akhir tahun nanti. Ia meminta agar seluruh lembaga pemerintah bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan mitigasi agar dampak El Nino tidak membebani rakyat.

"Fenomena El Nino yang dalam beberapa bulan ini terjadi telah mengakibatkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada perubahan iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia," tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra itu saat memimpin Sidang Paripurna yang dilakukan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

”

**FENOMENA EL NINO YANG DALAM BEBERAPA BULAN INI TERJADI TELAH MENGAKIBATKAN PERUBAHAN POLA CUACA GLOBAL YANG BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA PERUBAHAN IKLIM DI BERBAGAI WILAYAH DI DUNIA, TERMASUK DI INDONESIA.**

Dampak dari fenomena El Nino saat ini sudah dirasakan di beberapa tempat di Indonesia, diantaranya seperti terjadinya kekeringan yang berdampak pada turunnya produksi pertanian dan lonjakan harga bahan pangan. Serta mulai timbul kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di beberapa wilayah.

"Pemerintah hendaknya mempersiapkan langkah-langkah antisipatif agar kemarau panjang ini tidak berdampak membebani rakyat. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak, antara lain BMKG, BNPB,

Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, Badan Pangan Nasional, serta kementerian/ lembaga lain yang terkait sangat dibutuhkan untuk melakukan mitigasi," tegasnya. [gal/aha](#)



FOTO:JAKA/HAN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad.



# APBN 2024 Diarahkan untuk Percepat Transformasi Ekonomi



FOTO: DEWI/HAN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat Pidato Penutupan Rapat Paripurna Masa Persidangan I.

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024 disusun untuk dapat menuntaskan berbagai program prioritas sehingga dapat meninggalkan legasi landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebab, tahun 2024 merupakan tahun anggaran terakhir dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Untuk itu, Dasco mengingatkan agar pemerintah dapat menjalankan APBN Tahun Anggaran 2024 dengan menjaga kondisi ekonomi makro yang kondusif. "Dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inflasi yang terkendali, meningkatkan investasi dan dapat mengantisipasi transmisi tekanan perekonomian global ke domestik," paparnya dalam Pidato Penutupan Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024, di Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Pemerintah dan DPR RI, lanjut Dasco, sepakat bahwa APBN Tahun Anggaran 2024 akan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas belanja, mempertajam subsidi tepat sasaran, mengefektifkan program perlindungan sosial, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mempermudah kehidupan rakyat di berbagai bidang.

Adapun postur APBN 2024 yang telah disepakati yaitu pendapatan negara sebesar Rp2.802,2 triliun, belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun dan defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB. "Postur tersebut telah berada dalam desain fiskal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Pemerintah, dalam menjalankan UU APBN 2024 juga diminta untuk tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, tata kelola yang baik, efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# RUU Perubahan tentang Ombudsman RI Disetujui Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

**D**PR RI menyetujui RUU Perubahan atas Nomor 37 tentang Ombudsman RI menjadi RUU Usul

Inisiatif DPR RI. Persetujuan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ketika memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Persetujuan tersebut disampaikan setelah sebelumnya sembilan fraksi masing-masing menyampaikan pendapat fraksinya terhadap RUU tersebut.

"Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 tentang Ombudsman Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?" tanya Dasco yang dijawab 'setuju' oleh para Anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (3/10).

Diketahui dalam rapat paripurna ini, terdapat beberapa agenda yang dibahas, yakni, pertama, Pembicaraan Tingkat II /Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Kedua, Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Ketiga, Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Perubahan keenam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024, dan Penyusunan Prolegnas



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ketika memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I.

RUU Prioritas Tahun 2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

Keempat, Laporan Komisi III DPR RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (*Fit and proper test*) terhadap Calon Hakim Konstitusi Tahun 2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; Kelima, Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; Keenam, Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32. Tahun 2014 tentang Kelautan;

Ketujuh, Persetujuan Perpanjangan waktu pembahasan

terhadap (a) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); (b) RUU tentang Hukum Acara Perdata; (c) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (d) RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (e) RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (f) RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET); (g) RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kedelapan, Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. **hal**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Termasuk RUU DKJ, DPR Setujui 37 RUU Prolegnas Prioritas 2023



FOTO: AREF/HAN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat mengesahkan daftar Prolegnas Prioritas 2023 pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang ke I.

**R**apat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (3/10) menetapkan sebanyak 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) beserta 5 (lima) daftar RUU Kumulatif terbuka masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

"Apakah laporan Baleg DPR RI atas evaluasi kedua RUU Prolegnas RUU Prioritas 2023, perubahan keenam Prolegnas RUU tahun 2020-2024, dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2024 dapat disetujui?"

kata Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco yang disambut persetujuan peserta rapat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Nurdin menyatakan terdapat 6 RUU yang dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2023 dan dimasukkannya usulan baru dalam perubahan kedua RUU Prioritas tahun 2023 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sementara itu, lanjut Nurdin, dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas

Tahun 2024 Badan Legislasi telah menerima usulan RUU sebanyak 78 RUU, dimana 10 RUU merupakan usulan RUU baru untuk dipertimbangkan masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2024. Ke-10 RUU usulan baru itu adalah, RUU tentang Pertanahan sebagai inisiatif Komisi II DPR RI, Revisi UU tentang Pelayaran inisiatif Komisi V DPR RI.

Kemudian, RUU tentang Pertekstil, RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji inisiatif, RUU tentang Komoditas Strategis, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelima RUU tersebut merupakan inisiatif Badan Legislasi DPR RI.

"Selanjutnya, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik inisiatif DPD RI, RUU tentang Persandian serta RUU tentang Hukum Perdata Internasional usul pemerintah," jelas Nurdin.

Selain itu, Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM juga menyetujui jumlah Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020 - 2024 sebanyak 256 (dua ratus lima enam) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka serta jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. [ann/rdn](#)

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# PON XXI Gunakan APBD Aceh, Rafly Kande Minta Dikaji Ulang

**L**egislator Dapil Aceh I Rafly Kande menyoroti penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2024 (PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024) yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) hingga mencapai Rp1,2 triliun. Ia menilai hal tersebut akan membebani APBA yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Aceh.

"Sangat disayangkan juga pelaksanaan PON ini justru menguras anggaran APBA hingga mencapai Rp1,2 triliun. Perlu dipahami juga posisi anggaran APBA Aceh yang hari ini masih punya kewajiban dengan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) melalui BPJS itu tahun ini saja Rp700 sekian puluh miliar," ujarnya dalam interupsi Rapat Paripurna, di Jakarta, Selasa (3/10).

”

**SANGAT DISAYANGKAN JUGA PELAKSANAAN PON INI JUSTRU MENGURAS ANGGARAN APBA HINGGA MENCAPAI RP1,2 TRILIUN.**

Dalam kesempatan tersebut, Rafly meminta pemerintah melalui DPR untuk kembali mengkaji kebijakan tersebut. Sebab, Aceh masih membutuhkan banyak anggaran untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya.

"Justru kalau menguras anggaran APBA, kita sayangkan mestinya Pekan Olahraga Nasional ini menjadi

sebuah kebanggaan, bagaimana kita bisa memilih bibit-bibit unggul. Para pelaksana di dalam Pekan Olahraga Nasional ini, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Perlu dikaji kembali, perlu dikoreksi kembali agar kebahagiaan peralatan Pekan Olahraga Nasional tetap bisa berlangsung tetapi dengan tidak membebani anggaran kepada APBN Aceh," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Diketahui, Pekan Olahraga Nasional 2024 biasa disingkat PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024) adalah penyelenggaraan ke-21 dari Pekan Olahraga Nasional (PON) yang merupakan ajang multi-olahraga nasional utama yang dijadwalkan berlangsung dari 5 hingga 19 September 2024 dengan Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. — **bia/rdn**



FOTO: JAKA/HAN

Legislator Dapil Aceh I Rafly Kande saat Interupsi pada Rapat Paripurna.

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Perkuat Diplomasi Parlemen, Ini Kontribusi DPR dalam Sidang Internasional Selama MP ITS 2023-2024

**D**ewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 telah melakukan serangkaian kegiatan. Di antaranya memperkuat hubungan bilateral, mengikuti sidang, dan memimpin jaringan parlemen regional maupun internasional untuk membahas beragam isu serta permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat global.

"Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 juga semakin menegaskan kontribusi parlemen dalam pembangunan kawasan Asia Tenggara. Melalui Sidang Umum ke-44 AIPA yang sukses diselenggarakan pada bulan Agustus lalu, kita semakin optimistis bahwa Indonesia dapat lebih berperan di ASEAN. DPR RI juga melakukan pertemuan-pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari parlemen Turki, Kroasia, Amerika Serikat, dan Armenia," ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Sidang Paripurna ke-7 di Jakarta, Selasa (3/10).

Penguatan hubungan bilateral juga dilakukan melalui beragam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Ceko dan Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, serta kunjungan ke Timor-Leste, Ceko, Azerbaijan, dan Oman guna membahas berbagai



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Sidang Paripurna ke-7.

potensi kerja sama strategis. "DPR RI akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan tugas diplomasi antar parlemen, sehingga Indonesia memiliki posisi politik luar negeri yang semakin kuat," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Diketahui pada masa sidang I Tahun sidang 2023-2024 ini, DPR RI telah mengikuti beragam kegiatan Internasional diantaranya, *'Seminar on National Parliament, Democracy, and International Relations'* pada 30

Agustus-2 September 2023 di Dili, Timor Leste. Kemudian, Sidang *'Open Government Partnership'* (OGP) Global Summit ke-8 pada 5-7 September 2023 di Tallinn, Estonia. Serta, Konferensi Anggota Parlemen Muda se-Dunia Ke-9 pada 15-17 September 2023 di Hanoi, Vietnam. Terakhir, Sidang *'Asian Parliamentary Assembly'* (APA) *'Standing Committee on Social and Cultural Affairs'* pada 19-24 September 2023 di Baku, Azerbaijan.

gal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Marak Isu Beli Beras Dibatasi, Lodewijk Minta Masyarakat Tidak Perlu Panik



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

**W**akil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta Masyarakat tidak perlu membeli karena panik tidak dapat (*panic buying*) pasokan beras yang mulai mengkhawatirkan belakangan ini. Menurutnya pemerintah sudah memikirkan cara untuk memastikan pasokan beras agar selalu tersedia di masyarakat. Hal ini dikatakan Lodewijk, menanggapi isu pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

"Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil

”

**KITA SEDANG MENGHADAPI EL NINO, PEMERINTAH JUGA TELAH MENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK IMPOR BERAS, TENTUNYA JANGAN SEMPET MASYARAKAT MENJADI PANIC BUYING.**

kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempet masyarakat menjadi *panic buying*," kata Lodewijk

saat ditemui **Parlementaria** usai Rapat Paripurna DPR RI, di Selasa (3/10).

Menurutnya, jika terjadinya *panic buying* maka sebenarnya akan menyusahkan masyarakat yang sedang sangat membutuhkan. Sehingga di momen seperti ini, perlu adanya kerja sama dan kebijaksanaan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar ketersediaan pangan bisa cukup hingga El Nino benar-benar berlalu.

"Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan, sekarang ada El Nino, El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan walaupun pemerintah sudah mengambil (kebijakan tapi itukan dibatasi," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, saat ini pembatasan pembelian beras di ritel ini dilakukan atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Meski demikian pembatasan ini tidak akan dilakukan secara permanen dan akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan hal penting lain yang perlu dimitigasi yakni tidak menentunya cuaca yang akan mempengaruhi musim tanam di Indonesia.

"Kalau kita katakan setelah hujan mungkin ada banjir itu yang harus di mitigasi juga, dan setelah itulah musim tanam, berapa lama setelah itu panen produk yang dihasilkan, cukup enggak, itu yang tentunya harus dihitung Pemerintah," pungkas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam).

 we/rdn



# Jokowi Resmikan **Kereta Cepat WHOOSH, Gus Imin: Selamat, Semoga Manfaat!**

**W**akil Ketua DPR RI Bidang Koordinator

Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi dioperasikannya Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin (2/10). Pria yang akrab disapa Gus Imin itu menyatakan, kereta cepat

”

**KERETA CEPAT ITU SEGERA UNTUK KITA JADIKAN SARANA PERCEPAT PERJALANAN JAKARTA KE BANDUNG, MOGA-MOGA BERMANFAAT DAN SEMOGA PERJALANAN TRANSPORTASI PUBLIK SEMAKIN BAIK.**

merupakan sarana transportasi yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya.

“Kereta cepat itu segera untuk kita jadikan sarana percepat

perjalanan Jakarta ke Bandung, moga-moga bermanfaat dan semoga perjalanan transportasi publik semakin baik,” kata Gus Imin dalam keterangan tertulisnya di Demak, Senin (2/10/).

Meski demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong pemerintah untuk membantu meringankan tarif kereta cepat. Diketahui sejumlah pejalan mengeluhkan harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap masih mahal.

“Itu nanti kita bisa berharaplah supaya kementerian perhubungan memberi harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat untuk menikmati kereta,” tutur Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Legislator Dapil Jawa Timur VII memberikan ucapan selamat sekaligus menyampaikan harapan agar suatu saat nanti kereta cepat juga tersedia hingga Surabaya. “Selamat kepada pak Jokowi atas peresmian kereta cepat supaya nanti kita juga bikin kereta cepat Jakarta Surabaya,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) WHOOSH pada hari ini, Senin (2/10/2023) di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Selain menyatakan peresmian, presiden menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya KCJB. uc/rdn



FOTOMUNCHEN/HAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra (Koordinator Kesejahteraan Rakyat) Abdul Muhaimin Iskandar.

# Taufiq Abdullah Dorong TNI/Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri

**A**nggota Komisi I DPR RI Taufiq Abdullah mendorong agar baik TNI maupun Polri dapat memanfaatkan produk industri pertahanan dalam negeri. Hal ini merupakan satu di antara hal yang dibahas dalam saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi I DPR RI terkait kesiapan industri pertahanan.

"Harusnya ini diberdayakan lalu dimanfaatkan produk produknya. Sehingga, mereka semakin lama terjadi proses pembelajaran sehingga mencapai posisi bahwa kualitas produksi yang dihasilkan oleh (Kemhan) Ini semakin bagus," ujar Taufiq di Depok, Jawa Barat, Rabu (27/9).

Lebih lanjut, ia menilai meski industri pertahanan Indonesia belum sekuat negara-negara lain seperti

Perancis, Jerman dan negara maju lainnya, namun Indonesia sudah bertekad untuk memenuhi kebutuhan Alutsista. "Jangan sampai semuanya impor dan sudah membentuk atau mendirikan satu institusi industri petahana," ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Ia pun menjelaskan Kunspek ini diselenggarakan untuk melihat dua hal, yakni kesiapan Alutsista dan kesejahteraan prajurit. Menurutnya dua hal tersebut menjadi hal utama dalam melihat Kondisi Pertahanan Indonesia. "Alutsista misalnya, sesungguhnya memang kita masih

perlu penambahan Alutsista yang cukup banyak, dan ini tentu harus jadi perhatian kita semua untuk mencapai apa yang disebut dengan minimum *essential force*," tambahnya

Oleh karena saat ini belum mencapai itu, lanjutnya, semua pihak yang terkait seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan, perlu melihat kondisi tersebut sebagai sesuatu yang strategis, yang membutuhkan perhatian khusus agar bisa dipenuhinya.

Adapun terkait kesejahteraan prajurit, ia mengungkapkan bahwa faktanya dari sekitar 8000 prajurit yang ada, baru tersedia perumahan yang berkapasitas 6000 unit. Sehingga, masih ada 2000 prajurit yang belum memiliki rumah. Padahal, motto prajurit sendiri yakni agar selalu siap siaga. Ia mengungkapkan apabila 2000 dari 8000 pasukan tersebut tidak tinggal di daerah tersebut, akan berdampak pada pengkondisian dari siap siaga itu sendiri. "Itu ini juga jadi harus menjadi perhatian kita," jelasnya.

Maka dari itu dirinya berharap proses perencanaan dan penganggaran untuk Alutsista dan kesejahteraan prajurit perlu *needs assessment* (penjajakan kebutuhan). Sehingga dengan adanya itu, Indonesia dapat merumuskan prioritas. "Prioritas apa sesungguhnya yang dibutuhkan di lapangan? Jadi karena itu maka harus melibatkan semua stakeholders terutama adalah para pengguna di lapangan gitu, sehingga *mix* antara kebutuhan dengan perencanaan," tutupnya.

hal/rdn



Anggota Komisi I DPR RI Taufiq Abdullah saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi I DPR RI di Cilodong, Depok.

FOTO:HIRAN/HAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Kunjungi Serang, Komisi II Gelar Evaluasi Program Prioritas Nasional Soal Pertanahan

Isu sengketa tanah senantiasa menjadi sorotan bagi Komisi II DPR kepada Pemerintah Indonesia lantaran dinilai masalah ini kerap menimbulkan konflik sosial antar negara dan masyarakat setempat. Sebab itu, Komisi II DPR mengingatkan stakeholder terkait segera mencari solusi yang mangkus sekaligus tetap memberikan kinerja yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan target kerja yang ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah ATR/BPN di Serang, Provinsi Banten, Jumat

”

**MASALAH PERTANAHAN SELALU MENJADI ISU AKTUAL DARI MASA KE MASA, DAN HINGGA KINI MASIH TERUS MUNCUL DI BERBAGAI WILAYAH DI INDONESIA.**

(29/9). Hingga kini, pihaknya masih menerima laporan dari masyarakat soal sengketa lahan yang tidak kunjung usai.

”Masalah pertanahan selalu menjadi isu aktual dari masa ke masa,

dan hingga kini masih terus muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Komisi II DPR RI juga telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait dengan berbagai masalah pertanahan, baik yang disampaikan secara langsung ke Komisi II DPR RI, maupun pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing (anggota dewan),” ucap Wahyu.

Kementerian ATR/BPN sebagai garda terdepan dalam penanganan persoalan pertanahan, menurutnya, perlu mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia pun meminta Kementerian ATR/BPN memberikan kinerja yang sebaik-baiknya karena Pemerintah Indonesia menetapkan sektor pertanahan, HGU, dan tata ruang menjadi Program Prioritas Nasional Indonesia.

”Sebagai mitra kerja dari Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI sesuai dengan kewenangannya akan selalu berupaya mendukung sekaligus mengawasi kinerja Kementerian ATR/BPN agar optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program-program prioritas maupun dalam menangani berbagai masalah pertanahan yang ada,” tandasnya.

ts/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah ATR/BPN di Serang, Provinsi Banten.

FOTOSAUM/HAN

# Kunjungi Yogyakarta, **Komisi IV Serap Masukan Dari BP2MHKP**

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR dalam kunjungannya ke Provinsi Yogyakarta, melakukan pertemuan dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BP2MHKP) Yogyakarta. Menurut Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro, setidaknya ada dua masukan yang mengemuka, yakni terkait sarana dan prasarana juga kenaikan jenjang eselon di lingkungan BP2MHKP.

"Saya sangat terkejut, Kepala BP2MHKP yang menguasai laut seluas ini hanya setara dengan eselon IV. Saya pernah menjadi Dirjen di Kementerian Kehutanan,

Kepala Balai yang mengurus gajah dan harimau saja eselon II. Ini yang perlu kita perjuangkan, bahkan sebetulnya sudah berulang kali kami sampaikan pada rapat dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) periode yang lalu," ujar Darori di Sleman, Rabu (27/9).

Lebih lanjut Darori menyatakan, terkait fasilitas laboratorium, alat yang ada saat ini ternyata belum canggih dan masih manual. "Mestinya ke depan perlu dianggarkan untuk membeli alat yang sudah otomatis, yang sudah modern walaupun harganya mahal tapi itu penting. Dapat mempercepat proses pemeriksaan produk perikanan yang akan dikirim,

baik kedalam maupun luar negeri," harap Darori.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, KKP untuk lebih ketat lakukan pengawasan di jalur rawan penyelundupan, apalagi Yogyakarta ada penerbangan langsung ke Singapura dan Malaysia. "Hal ini harus menjadi perhatian karena potensi kebobolan penyelundupan cukup tinggi. Sedangkan mengenai jabatan di BP2MHKP eselonnya dinaikkan, hal ini akan memberikan kesempatan jenjang karir di bawahnya untuk ikut naik juga. Tolonglah pihak-pihak yang berwenang hal ini diperhatikan betul, paling tidak unit-unit di daerah ini ditingkatkan," pinta Darori.

man/aha



FOTO: ANDRI/HAN

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR dalam kunjungannya ke Provinsi Yogyakarta, melakukan pertemuan dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BP2MHKP) Yogyakarta.



# Butuh Layanan Ekstra, Legislator Dorong Kota Medan Segera Benahi Terminal Pinang Baris

**K**omisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (kunsfik) untuk meninjau Terminal Amplas, Medan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pengelolaan dan fungsi berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Anggota Komisi V DPR RI Sudewo melihat kota Medan membutuhkan pelayanan ekstra sehingga dibutuhkan terminal tipe A seperti Terminal Amplas lainnya. Ia pun mendorong agar Terminal Pinang Baris dapat segera dibenahi seperti Terminal Amplas.

"Kota Medan ini kota yang cukup besar sampai di kota-kota provinsi butuh pelayanan ekstra, Medan ke Aceh, Medan ke Pekanbaru, Medan ke Padang, dan lain sebagainya menurut saya tidak cukup dilayani dengan 1 terminal tipe A yaitu terminal amplas tetapi bisa dengan terminal lain seperti Terminal Pinang Baris atau lainnya," ujar Sudewo kepada **Parlementaria** di Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/9).

Sehingga menurutnya akan cukup representative apabila kota Medan yang begitu besar dilayani dengan 2 terminal tipe A. "Maka saya mendorong dirjen perhubungan darat untuk segera membenahi Terminal Pinang Baris menjadi terminal yang modern jangan sampai terlalu lama agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal," imbuhnya.

Lanjutnya, ia menilai Terminal Amplas di kota Medan yang dibangun untuk mengurangi kemacetan dan mengatasi illegal terminal telah

memiliki sarana dan prasarana yang cukup bagus. Selain itu, Terminal Amplas juga multifungsi untuk mendorong kegiatan UMKM di kota Medan. Namun untuk melihat keefektifitasannya menurutnya masih membutuhkan waktu.

"Kalau dalam hal terminal dari sarana dan prasarana kita bisa memberikan penilaian secara langsung sudah cukup bagus, tetapi fungsi lain dalam hal mengatasi kemacetan di kota Medan dan juga untuk menertibkan illegal terminal belum bisa kita nilai sekarang, masih butuh waktu untuk melihat semua itu, apakah itu bisa dijawab atau tidak," jelasnya.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga telah mendorong agar Kementerian Perhubungan dan Pemerintah kota Medan dapat mengakomodasi setiap keluhan masyarakat terhadap adanya terminal operasional itu. Hal ini agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Terminal Amplas untuk terus memperbaiki pelayanannya.

"Apa yang diinginkan masyarakat dan apa saja yg diinginkan pemilik angkutan, kru angkutan juga itu harus didengar sebagai bahan evaluasi, kalau perlu adanya evaluasi dalam penyelenggaraan terminal ini ya kita revisi, misal desainnya, kebijakan pelayanannya. Dan semua itu harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pengguna terminal," tandasnya.

— gal/aha



FOTO: GALUH/HAN

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat melakukan kunjungan kerja spesifik (kunsfik) ke Medan, Sumatera Utara.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VI: Perlu Sinergi Antar-BUMN Dorong Transisi Energi

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar-BUMN sektor energi, yakni Pertamina dan PLN. Ia yakin dengan koordinasi yang baik, usaha untuk melakukan transisi energi akan jauh lebih cepat.

"Saya yakin kalau PLN dan Pertamina ini bisa berkoordinasi dengan baik, usaha kita untuk melakukan transisi energi ini akan jauh lebih cepat, jauh lebih masif. Sehingga target kita bisa

”

**SAYA YAKIN KALAU PLN DAN PERTAMINA INI BISA BERKOORDINASI DENGAN BAIK, USAHA KITA UNTUK MELAKUKAN TRANSISI ENERGI INI AKAN JAUH LEBIH CEPAT, JAUH LEBIH MASIF. SEHINGGA TARGET KITA BISA TERCAPAI INI SEBENARNYA BUKAN HANYA PERSOALAN INTERNASIONAL TAPI UNTUK KEPENTINGAN KITA.**

tercapai ini sebenarnya bukan hanya persoalan internasional tapi untuk kepentingan kita," jelasnya dalam Rapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Jakarta, Senin (2/10).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kepentingan nasional harus didahulukan

dalam usaha transisi energi ini. Oleh sebab itu, kepentingan internasional bisa dilakukan selama hal tersebut selaras dengan kepentingan nasional.

"Yang harus kita utamakan adalah kepentingan nasional kita. Kalau itu memang selaras dengan kepentingan nasional kita, ya kita akan jalan, tetapi kalau tidak selaras dengan kepentingan nasional, kita tentu kita harus berhitung ulang," imbuhnya.

Diketahui, beberapa langkah Pertamina dalam upaya transisi energi adalah, pertama, melaksanakan transisi energi dengan tetap memprioritaskan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Kedua, meningkatkan produksi migas, baik domestik dan di luar negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat infrastruktur gas, agar dalam operasionalnya dilakukan secara green operation.

Ketiga, mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, sehingga tetap menjamin keterjangkauan harga untuk masyarakat. Keempat, melakukan modernisasi kilang untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan produk yang lebih rendah emisi. Kelima, mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) untuk mengurangi impor BBM sekaligus menurunkan emisi karbon. Keenam, membuka diri dalam kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian NZE. [bia/rdn](https://www.bia.rdn)



FOTO: OJI/RIHAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji dalam Rapat Panja Transisi Energi bersama Dirut Pertamina dan PLN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.



# Bahasan RUU KIA, Diah Pitaloka Tanggapi Efektivitas Cuti Melahirkan bagi Ayah

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) merujuk pada cuti ayah yang diwacanakan mendapatkan perpanjangan hingga 40 hari. Ia menilai cuti 2 hari yang saat ini didapatkan ayah pasca melahirkan tidak efektif.

**”**  
**DARI BADAN LEGISLASI ITU KAN PEMBAHASANNYA CUTI BAGI AYAH HINGGA 40 HARI, TAPI KITA MASIH GODOK NIH APAKAH EFEKTIF ATAU TIDAK YANG JELAS MERUJUK PADA ATURAN SEKARANG DIMANA AYAH MENDAPATKAN CUTI KURANG LEBIH 2 HARI ITU TIDAK EFEKTIF.**

“Dari Badan Legislasi itu kan pembahasannya cuti bagi ayah hingga 40 hari, tapi kita masih godok nih apakah efektif atau tidak yang jelas merujuk pada aturan sekarang dimana ayah mendapatkan cuti kurang lebih 2 hari itu tidak efektif,” katanya saat rapat sinkronisasi RUU KIA di Gedung DPR, Rabu (27/9).

Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, peran ayah pasca melahirkan sangat dibutuhkan untuk membantu dalam proses tumbuh kembang anak. Pada dasarnya dukungan suami selalu dibutuhkan setiap saat sehingga peran untuk mengasuh anak harus terus dilakukan.

“Peran ayah juga sangat penting untuk proses tumbuh kembang anak, saat ini Undang-Undang mengatur cuti untuk ayah hanya 2 hari sedangkan bagi ibu itu 3 bulan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, Panja RUU KIA sedang memahami proses parenting bagi ibu dan ayah untuk selanjutnya akan diputuskan berapa lama cuti melahirkan yang tepat bagi suami dan istri pasca melahirkan.

“Saat ini kita masih pahami dulu gimana sih proses parenting, selanjutnya baru kita putuskan waktu yang tepat untuk cuti melahirkan. Dalam pembahasan RUU KIA ini juga kami libatkan langsung pemerintah dan para ahli untuk menemukan solusi yang tepat,” sebut Diah. **tn/aha**



FOTO:RUNI/HAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pada saat Rapat Sinkronisasi RUU KIA di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

# Evaluasi *Stakeholder* Pengelola Danau Toba Demi Cegah Terdepak dari *Geopark* UNESCO

**M**enindaklanjuti 'kartu kuning' dari UNESCO Global Geopark (UGGp), Komisi X DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para *stakeholder* yang memiliki andil terhadap pengelolaan Danau Toba. Tujuan dari agenda ini digelar guna mencari akar masalah sekaligus evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan. Upaya ini bernilai krusial demi Danau Toba tidak terdepak dari daftar *Geopark* UNESCO.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti saat membuka forum tersebut di Jakarta, Senin (2/10). Rapat Dengar Pendapat itu menghadirkan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jimmy Bernando Panjaitan, Sekretaris Kememparekraf/Baparekraf N.W. Giri Adnyani, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kememparekraf Hariyanto, dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Judi Wahjudin.

"Kami berharap kita bisa memperjuangkan mati-matian untuk (Danau Toba) tidak dicabut (dari *Geopark* UNESCO). Karena dampak dari (jika) status dicabut akan berkorelasi negatif terhadap kepariwisataan Indonesia khususnya di *Geopark* Kaldera Toba, yang menjadi



FOTO: FARHAN/HAN

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut BPOD, Sekretaris Kememparekraf/Baparekraf dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek.

salah satu bagian dari destinasi super prioritas kita," ungkap Agustina.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan peristiwa 'kartu kuning' ini tidak terulang kembali. Sebab itu, ia ingin setiap *stakeholder* menjelaskan sebab-musabab yang mengakibatkan Danau Toba berpotensi terdepak dari daftar *Geopark* UNESCO. Di sisi lain, imbuhnya, masalah ini menjadi wawasan bagi Komisi X DPR untuk memperkuat argumentasi revisi UU

Kepariwisataan, yang kini sedang dilakukan pihaknya.

"Hasil dari agenda ini, kami cantumkan ke dalam substansi revisi Undang-Undang pariwisata khususnya terkait mengenai pengaturan kelembagaan dan pengaturan kewenangan pusat dan daerah supaya destinasi wisata super prioritas dalam pengelolaannya terhadap lembaga yang terlibat ini bisa tepat, sesuai dengan tupoksi, tidak tumpang tindih seperti ini," tandasnya.

ts/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi XI Setujui Suntikan Dana Pemerintah Pada Sejumlah BUMN Tahun 2023 dan 2024

**K**omisi XI DPR RI menyetujui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini termaktub dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (2/10).

"Komisi XI DPR RI menyetujui Pemerintah melaksanakan PMN Tunai dan Non Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2023 dan PMN Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2024," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P saat membacakan kesimpulan Rapat.

Terdapat enam BUMN yang mendapatkan suntikan dana segar melalui PMN Tunai tahun Anggaran 2023, antara lain; 1) PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28.884 Miliar; 2) Perum LPPNPI/Airnav sebesar Rp659,19 Miliar; 3) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3.000 Miliar; 4) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1.530 Miliar; 5) PT. Len Industri (Persero) sebesar Rp1.754 Miliar; dan 6) PT. Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp1.014,2 Miliar.

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa terdapat tujuh BUMN yang mendapatkan PMN Non Tunai baik berupa konversi Piutang APBN dan berupa Barang Milik Negara. Adapun PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT. Len Industri (Persero) mendapatkan konversi Piutang APBN masing-masing



FOTO: MUNCHEN/HAN

Para Pimpinan Komisi XI DPR RI Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mitra sesuai Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

sebesar Rp2.564,71 Miliar dan Rp456,25 Miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi XI DPR RI juga memberikan lampu hijau terhadap penambahan PMN tunai bagi tiga BUMN yang akan melakukan pencairan tahun 2024 mendatang.

"PMN tunai Tahun Anggaran 2024; PT Hutama Karya (Persero) sebesar 18,6 triliun, PT BPUI sebesar 3,556 triliun, PT Wijaya Karya sebesar 6 triliun. Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya kebijakan dan program / pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir yang merupakan kesimpulan RDP yang tidak terpisahkan dari kesepakatan

rapat kerja ini," lanjut legislator Dapil Jawa Tengah IV itu.

Selain sejumlah entitas yang telah disebutkan, terdapat dua BUMN lain yang pengajuan PMN-nya ditolak yaitu PT. PLN (Persero) dan PT. Bina Karya (Persero). Komisi XI DPR RI juga sepakat untuk membatalkan Penambahan PMN TA 2022 sebesar Rp3 Triliun kepada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Perusahaan tersebut harus terlebih dahulu melakukan restrukturisasi dengan para krediturnya. Sehingga, pengerjaan penyelesaian proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi kemudian dialihkan kepada PT. Hutama Karya (Persero).

uc/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Baleg Setujui Revisi UU Kejaksaan Jadi Usul Inisiatif DPR

**R**apat Pleno Baleg menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Pengambilan keputusan diawali dengan penyampaian laporan Ketua Panja kepada peserta Rapat Pleno Baleg yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi di Jakarta, Senin malam (2/10).

"Apakah laporan rapat Panja bisa diterima," tanya Baidowi yang disambut persetujuan anggota rapat. Diketahui, 8 Fraksi di DPR RI menyetujui perubahan kedua UU Kejaksaan, sementara Fraksi PKS menolak revisi tersebut.

Dalam laporannya, Ketua Panja Revisi UU Kejaksaan, Supratman Andi Agtas, menyampaikan Kejaksaan RI dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 perlu dilakukan.

Adapun perubahan Kedua atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdiri atas 6 (enam) angka perubahan dengan materi muatan perubahan



Rapat Pleno Baleg menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi di Jakarta.

yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat antara lain: Pertama, Di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, maupun kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Selanjutnya, melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Kejaksaan membentuk Badan Pemulihan Aset. Dan ketentuan

mengenai pembentukan Badan Pemulihan Aset diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Poin perubahan juga terkait hal selain tugas dan kewenangan menyelenggarakan kesehatan yustisial Kejaksaan, turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal serta persyaratan mediasi penal dan penarikan penuntutan.

Kemudian, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya serta badan hukum publik atau badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan dihapuskannya kewenangan peninjauan kembali. **ann/aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# DPR RI & Parlemen Yunani Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Pariwisata

Indonesia dan Yunani telah lama menjalin kerjasama bilateral yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama di berbagai bidang. Satu diantaranya yaitu kerjasama ekonomi terkait ekspor kopi, minyak kelapa sawit, kertas dan mebel. Bahkan, total perdagangan Indonesia dan Yunani pada tahun 2022 mencapai setidaknya USD 420 Juta (USD 421,5 Juta).

Hal itu disampaikan Ketua GKSB DPR RI-Yunani Nasim Khan saat diwawancarai **Parlementaria** usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar LBBP Republik Yunani untuk Republik Indonesia Stella Bezirtzoglou di Jakarta, Senin (2/10).

"Selama ini ada beberapa produk Indonesia yang diekspor ke Yunani termasuk kopi, minyak kelapa sawit, kertas dan mebel. Parlemen Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yunani juga telah menandatangani POA (*Plan of Actions*) sebagai panduan implementasi dari *'Agreement Economic Cooperation RI-Yunani'* (*POA for Advancing Economic Cooperation Between Indonesia and Greece for the period of 2023-2028*)," ujar Nasim Khan.

Melalui penandatanganan kerjasama itu, Nasim Khan yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini berharap hubungan ekonomi antar kedua negara dapat semakin lebih erat tanpa adanya halangan. Apalagi, Indonesia juga merupakan pasar potensi bagi Yunani dimana Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk sangat besar hingga kurang lebih mencapai 270 juta penduduk.



FOTO: FARHAN/HAN

**Ketua GKSB DPR RI - Yunani Nasim Khan saat bertukar cinderamata dengan Duta Besar LBBP Republik Yunani untuk Republik Indonesia Stella Bezirtzoglou usai menerima kunjungan kehormatan yang digelar di Senayan, Jakarta.**

Selain bidang perdagangan, Nasim Khan juga mendorong peningkatan kerjasama pariwisata Indonesia dan Yunani. Mengingat selain perdagangan, pariwisata merupakan salah satu sektor penting untuk memajukan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Saat ini, ungkapnya, Indonesia memiliki 5 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur) dan Likupang (Sulawesi Utara).

Dalam hal mempromosikan wisata Indonesia, ungkapnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Athena juga telah berpartisipasi pada Pameran *'The 9th Athens International Tourism*

*Expo'* (AITE) yang berlangsung di gedung bersejarah Zappeion di Athena, Yunani pada tanggal 3-5 November 2022. Pada pameran itu, KBRI tampil dengan *booth* berhiaskan *banner* dengan destinasi pariwisata di Indonesia..

"Kami berharap tentunya kedepan lebih banyak lagi masyarakat Yunani yang berkunjung ke negara kita, apalagi mereka bisa belajar tentang budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Kita juga berharap untuk bisa belajar lebih dari Yunani yang bisa menarik hingga 30 juta wisatawan dalam setahun..," tandas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut. **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





**SEKRETARIS JENDERAL DPR RI INDRA ISKANDAR SAAT FOTO BERSAMA SETELAH MENGHADIRI ACARA SOSIALISASI DAN PENGISIAN SURVEI BUDAYA KERJA DI GEDUNG NUSANTARA DPR RI, JAKARTA. FOTO: FARHAN/HAN**



**KETUA BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT) DPR RI AGUNG BUDI SANTOSO BERSAMA KEPALA BADAN KEAHLIAN (BK) DPR RI INOSENTIUS SAMSUL MENGIKUTI SEMINAR NASIONAL (SEMNAS) DI JAKARTA, JUMAT (22/9/2023). FOTO: HIRA/AGUNG**



**ANGGOTA KOMISI IV ONO SURONO SAAT MENGIKUTI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV KE KABUPATEN KUDUS, JAWA TENGAH. FOTO: MENTARI/HAN**

